



**Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau**

RENJA

Rencana kerja

2026

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dapat disusun. Renja ini merupakan turunan RKPD dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang telah melalui proses perencanaan partisipatif. Didalamnya termuat visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah. Selain itu juga, dokumen ini sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan *good and clean governance*, dengan mengusung tema pembangunan tahun 2026 **"Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**.

Penyusunan dokumen ini sebagai pedoman perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau agar lebih baik.

Tanjungpinang, 15 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



DR. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690504 200003 1 008

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Landasan Hukum	2
III. Maksud dan Tujuan	9
IV. Sistematika Penulisan	10
BAB II	11
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	11
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	11
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	40
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	50
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA	52
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	74
BAB III	79
TUJUAN DAN SASARAN	79
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	79
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA	83
3.3. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	84
BAB IV	90
RENCANA KERJA DAN PERNDANAAN	90
4.1. RENCANA KERJA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	90
BAB V	113
PENUTUP	113
5.1. KAJIAN PELAKSANAAN	113
5.2. RENCANA TINDAK LANJUT	114

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
2.1.	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU S.D TAHUN 2024	12
2.2.	PENCAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	49
2.3.	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.....	53
2.4.	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH DALAM POKOK POKOK PIKIRAN DEWAN TAHUN 2026	76
3.1.	KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2025 DENGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	80
3.2.	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026	84
4.1.	RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	91
4.2.	PRIORITAS, SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIA U TAHUN 2026	112

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, sehingga diperlukan adanya sinergi dan keterkaitan antara visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Pembangunan daerah diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, yaitu ***“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”***. Perwujudan visi tersebut dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun, di mana Renja Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 menekankan pendekatan *money follows program* melalui penganggaran berbasis kinerja, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang holistik, integratif, tematik dan spasial terhadap berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya alam yang tersedia yang sangat mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Renja dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, serta pendekatan *bottom up* dan *top down*, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi meskipun belum seluruh usulan dapat terakomodasi secara optimal akibat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat agar perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan secara sinergis, terarah, dan optimal.

II. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 antara lain, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana diubah sebanyak 3 kali, dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); dan perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Indikator Kinerja Utama;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Terumbu Karang Provinsi Kepulauan Riau;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Rencana Tentang Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
41. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 442);
42. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 453);
43. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Wewenang Lainnya pada Cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 653);
44. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 909);
45. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 976).

III. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada periode 1 (Satu) tahun mendatang agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan ;
2. Menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang terukur, realistis dan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
3. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional melalui forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
4. Menyediakan acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
5. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran melalui perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran berbasis program prioritas;
6. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar program/kegiatan pembangunan lintas perangkat daerah dan antar level pemerintahan;
7. Menetapkan strategi pencapaian target Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai;
8. Memberikan informasi dan pedoman bagi sub unit di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan Kertas Kerja.

IV. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RANWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan tujuan dan sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta tabel rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan atas substansi Ranwal Renja Perangkat Daerah dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 didasarkan dan merujuk pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mengelola APBD sebesar Rp73.296.413.023,00 untuk pelaksanaan 6 program, 18 kegiatan, dan 42 subkegiatan. Pada APBD Perubahan 2024, anggaran mengalami penurunan menjadi Rp69.852.198.766,00 dengan struktur program tetap. Realisasi anggaran mencapai Rp67.666.654.729,83 atau 96,87 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Capaian kinerja pada tingkat tujuan, sasaran, dan program hingga akhir Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau s.d Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Urusan Kelautan dan Perikanan											
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau											
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	100	BB	BB	100	
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3 25 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100	
3 25 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3	2	2	100,00	3	3	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
25 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	2	0	2	2	100,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3 25 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0,00	2	2	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	4	4	4	100,00	4	4	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	98	96	96	113	117,71	98	111	113,26	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	12	27	225,00	12	12	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	0	1	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persen	100	0	100	100	100	100		0	
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	#DIV/0!	1		0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	0	0	0	#DIV/0!	1		0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	0	35	70	200,00	20		0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	62	0	0	0	#DIV/0!	31		0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100		0	0
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	25	4	5	0	0,00	10	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	8	0	0	0	0,00	4	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	8	0	0	0	0,00	4	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	8	0	0	0	0,00	4	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	8	0	0	0	0,00	4	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	8	0	0	0	0,00	4	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	8	3	0	0	0,00	4	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Paket	8	0	0	0	0,00	4	0	0	UPTD BPMP2KP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan										
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	0	2	2	100,00	4	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	30	10	10	17	170,00	10	10	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	0	1	1	100,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	27	12	7	19	271,43	10	10	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12	1	16	1600,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Anambas

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	10	12	6	18	300,00	2	6	300	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	9	12	5	17	340,00	2	5	250	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	0	3	3	100,00	2	4	200	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	0	1	2	200,00	2	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	4	200	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	0	3	3	100,00	2	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	9	12	4	15	375,00	2	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	0	1	1	100,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	12	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BBI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	1	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	28	0	4	16	400,00	12	12	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	12	0	0	0,00	12	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	12	1	12	1200,00	12	12	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	12	4	12	300,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Anambas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	0	4	12	300,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	12	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	12	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	0	0	0	0,00	12	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	12	0	0	0,00	12	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	0	4	12	300,00	12	12	100	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Natuna

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	8	0	4	4	100,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Anambas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	5	0	0	0	0,00	3	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BBI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	100	5	20	20	100,00	50	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	0	1	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	0	3	3	100,00	1	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						Daya Air dan Listrik yang disediakan										
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	UPTD BBI
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	12	12	12	100,00	12	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	UPTD BBI
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	12	12	12	100,00	12	12	100	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
					Presentasi Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, Gedung dan Bangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	25	01	1.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	14	5	4	4	100,00	5	3	60	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2	1	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2	1	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	3	0	1	3	300,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	01	1.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2	2	0	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan	Unit	5	1	3	3	100,00	1	2	200	UPTD BBI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
3	25	01	1.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	1	0	0	0,00	1	1	100	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	76	23	46	46	100,00	20	23	115	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	0	2	2	100,00	2	2	100	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannva	Unit	5	0	0	0	0,00	3	0	0	Cabang Dinas KP Natuna

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Operasional atau Lapangan											
3	25	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	0	2	2	100,00	3	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	0	0	0	0,00	3	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	0	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	62	12	50	25	50,00	6	46	766,666667	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	3	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	2	9	8	88,89	2	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	2	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	1	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Karimun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	2	0	0	0,00	2	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	1	0	0	0,00	2	0	0	UPTD BBI
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	8	1	4	4	100,00	2	6	300	UPTD BPMP2KP
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	11	1	7	7	100,00	2	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	5	0	1	0	0,00	2	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	0	1	0	0,00	1	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	Kawasan	4	4	4	4	100	4	4	100	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen peraturan pengelolaan pemanfaatan ruang laut	Dokumen	4	5	1	5	500	1	5	500	
						Luas kawasan konservasi daerah yang dikelola minimum	Ha	3824653,13	138.561,42	138.561,42	138561,42	100	575.514,88		0	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Peisir dan Pulau- Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	2.613.290,18	138.561,42	138.561,42	138.561,42	100,00	575.514,88	845.507,94	146,9133066	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Penetapan dari Pemerintah Pusat											
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	297.414,51	0	0	0	0,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	742.170,04	0	0	0	0,00	371.085,02	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	131.736,88	0	0	0	0,00	65.868,44	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang di Rehabilitasi	Ha	22	0	0	0	0,00	10	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui Program Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	420	0	0	0	0,00	210	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terampil	Orang	884	170	20	20	100	482	25	5,19	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	300	150	0	0	0,00	200	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	0	0	0	0,00	50	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	0	0	0	0,00	50	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	120	20	20	20	0,00	50	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	0	0	0	0,00	50	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	0	0	0	0,00	50	25	50	Cabang Dinas KP Batam
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	14	0	0	0	0,00	7	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	10	0	0	0	0,00	5	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti	Kelompok	10	0	0	0	0,00	5	0	0	Cabang Dinas KP Natuna

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	10	0	0	0	0,00	5	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	10	0	0	0	0,00	5	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	10	0	0	0	0,00	5	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	309538,6	320.391,79	308305,6	339.331,02	110,063	308921,6		0	
						Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	116,3	104,14	116	105,28	90,7586	116,1		0	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diserahkan	Unit	15000	2810	26740	14248	53,2835	16437	14.248	86,68248 464	
						Jumlah Nelayan Yang Mendapatkan Pembinaan Usaha Kenelayanan (Asuransi nelayan, KUB/Pelaku usaha)	Orang	36228	25888	36228	31556	87,1039	36228	31.556	87,10389 754	
						Jumlah penerima bantuan sarana perikanan tangkap	Orang/ Kelompok	1000	4060	2208	9389	425,226	1500	2.145	143	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dokumen	1	0	0	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	1	1	1	1	100,00	1	1	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	(Unit/Paket)	16.437		15.846	14.248	89,92	14.248	14.248	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Rekomendasi	350	549	150	669	446	0	0	0	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	350	549	150	669	446,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	Dokumen	20	0	20	20	100	1410	0	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	20	0	20	20	100,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelayanan terhadap kapal perikanan	Layanan	300	500	300	550	183,333	300	300	100	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	4	0	3	1	33,3333	3	3	100	
3	25	3	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuha n Perikanan	1	0	0	0	0,00	1	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	3	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	3	0	3	1	33,33	2	1	50	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	3	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1	0	0	0	0,00	1	0	0	UPTD BPP Antang
3	25	3	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	2		0	0	0,00	2	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	3	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	3	3	2	3	150,00	3	5	166,6666 667	UPTD BPP Antang
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal yang diterbitkan	Rekomendasi	0	160	140	211	150,714	0	0	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	0	0	0	0,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	0	0	0	0,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	0	0	0	0,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	0	0	0	0,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	100	70	141	201,43	0	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	3	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	60	70	70	0,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	35.288,63	31.250,00	30.614,37	39.898	130,32	32.955,78	32.955,78	100	
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks (%)	112,32	96,08	111,20	96,69	86,95	111,76	96,69	86,52	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	Orang	1210	125	948	525	55,3797	1190	525,00	44,12	
						Jumlah Luasan pemanfaatan lahan perikanan budidaya	Ha	30	15	30	30	100	30	30	100,00	
						Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Pembesaran dan unit usaha baru perikanan budidaya yang tersedia	Unit	1190	125	948	525	55,3797	1190	525	44,12	
						Jumlah ketersediaan benih bermutu di UPTD BBI	ekor	100000	80000	100000	48219	48,219	130000	48.219	37,09	
						Jumlah ketersediaan induk unggul di UPTD BBI	ekor	500	200	300	100	33,3333	400	100	25,00	
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Dokumen	4	1	1	1	100,00	1	1	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	690	30	418	415	99,28	670	4	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	10	15	15	100,00	10	0	0	UPTD BBI
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	520	18	10	9	90,00	520	8	1,54	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	15	2	1	1	100,00	15	0	0	UPTD BBI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	1	1	1	1	100,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Ha	0	5	30	12	40,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90	98	90	100	111,111	90	96	106,67	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah laporan hasil pengawan pelaku usaha yang diawasi kepatuhannya	Dokumen	3		3		0	3	3	100	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	30	1	5	500,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	50	1	1	100,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Lingga

Kode					Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Laut sampai dengan 12 Mil	Ruang Laut sampai dengan 12 Mil										
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	30	1	2	200,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	27	1	1	100,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	0	1	1	100,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	0	1	1	100,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	0	15	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Pengawas (POKMASWAS)											
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	2	5	2	5	250,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Anambas
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	0	3	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Natuna
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	0	2	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Lingga
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	0	3	0	0	#DIV/0!	0	0	0	Cabang Dinas KP Karimun
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	10	5	10	15	150,00	0	0	0	Cabang Dinas KP Batam
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13500	18.099,33	13200	19.692,58	149,19	13400	13400	100	
						Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kap/ta hun	65,62	67,80	65,17	68,17	104,60	65,36	65,36	100	
						Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	31.830.578	58.661.976,29	31.817.85 0	48.579.904, 53	152,68	31.824.214	31.824.214	100	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Jumlah fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan	Event/ke giatan	5	1	2	2	100	2	2	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar										
						Jumlah unit usaha pengolahan ikan (UPI) yang diuji kelayakan mutu produk	Unit Usaha	55	21	55	58	105,455	65	65	100	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	4	0	4	4	100,00	0	0	0	UPTD BPMP2KP
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	5	2	5	10	200,00	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan	Unit, Usaha	55	21	55	48	87,27	0	0	0	UPTD BPMP2KP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan serta Sub kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Tahun 2024 Target program			Target program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		Unit Kerja
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					atau digunakan, dan Berdaya Saing	Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing										
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang memperoleh bahan baku industry pengolahan ikan	Kelompok	20	0	5		0	10	0	0	
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Unit Usaha	4	0	200	247	123,50	4	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja serta yang didasarkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2024–2026, sebagaimana disampaikan berikut :

1. Indikator tujuan pada tahun 2024 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 adalah **“Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku”** dengan target 3.313,00 miliar rupiah telah terealisasi sebesar 6.052,98 miliar rupiah, sehingga capaian melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari kontribusi subsektor perikanan terhadap ekonomi daerah, yang mencerminkan keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan, baik dari sisi produksi tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan. Realisasi yang melebihi target ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Peningkatan volume produksi perikanan tangkap dan budidaya, yang secara langsung meningkatkan nilai output subsektor perikanan.
 - b) Pengembangan produk olahan perikanan dan peningkatan ekspor, yang meningkatkan nilai tambah dan devisa daerah dari sektor perikanan.
 - c) Efektivitas program pendampingan dan fasilitasi pembudidaya ikan serta nelayan, termasuk pemberian sarana, prasarana, dan pelatihan yang mendorong produktivitas dan kualitas hasil perikanan.
 - d) Stabilitas harga dan peningkatan akses pasar, baik domestik maupun internasional, yang turut memperbesar kontribusi nilai perikanan terhadap PDRB.
2. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat 11 (sembilan) indikator program yang juga merupakan indikator sasaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, memiliki indikator kinerja yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan target predikat BB, dan pada Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sesuai target dengan predikat BB. Capaian ini merupakan hasil penilaian oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Penilaian juga mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

- Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

Indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan telah terealisasi sebesar 100 persen. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal, yang meliputi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, dukungan operasional, serta pelayanan administrasi umum lainnya, sehingga seluruh proses administrasi internal dapat berjalan dengan lancar, tertib dan tepat waktu.

b) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum

Indikator kinerja pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola minimum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PRL Nomor 281/KEP-DJPRL/2020 dengan target sebanyak 4 (empat) kawasan pada tahun 2024, telah terealisasi sepenuhnya, yakni sebanyak 4 kawasan konservasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini meliputi Kabupaten Bintan (Bintan I dan Bintan II), Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kota Batam. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah berhasil

melaksanakan tahapan pengusulan pencadangan kawasan konservasi Bintang II, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bintang II Provinsi Kepulauan Riau, setelah sebelumnya kawasan Bintang I telah ditetapkan pada tahun 2022.

Pengelolaan kawasan konservasi tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan, meliputi penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan kawasan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut, serta upaya perlindungan terhadap sumber daya kelautan, pesisir dan keanekaragaman hayati. Selain itu, pemanfaatan kawasan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan ekonomi masyarakat. Dengan tercapainya target indikator ini, pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai modal pembangunan daerah dalam jangka panjang.

c) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap ditetapkan dengan target sebesar 308.305,60 ton pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 339.331,02 ton, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan produktivitas perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yang signifikan.

Upaya untuk mencapai indikator tersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Pendampingan dan sosialisasi oleh Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yang secara aktif memberikan

informasi dan pembaruan terkait peraturan serta regulasi yang berlaku, khususnya mengenai kebijakan pemerintah terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pendekatan ini bertujuan agar nelayan memahami prosedur dan aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya, dilakukan fasilitasi perizinan kepada nelayan agar aktivitas penangkapan ikan dapat berlangsung secara legal, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas juga menyediakan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, termasuk alat tangkap, kapal, dan fasilitas pendukung lainnya, untuk meningkatkan kapasitas produksi nelayan. Selain itu, perlindungan sosial bagi nelayan skala kecil juga menjadi perhatian, melalui penyediaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga nelayan memperoleh jaminan sosial dan keamanan kerja dalam melaksanakan aktivitas perikanan tangkap. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, capaian produksi perikanan tangkap tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditetapkan dengan target sebesar 116,00, namun pada tahun 2024 terealisasi sebesar 105,28. Belum tercapainya target ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang harus dikeluarkan nelayan, sementara harga jual ikan hasil tangkapan mengalami penurunan. Kenaikan harga pada komponen biaya produksi dan konsumsi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan meningkatnya pengeluaran nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mempengaruhi pencapaian NTN.

Kondisi ini tidak berkorelasi langsung dengan jumlah produksi perikanan tangkap, yang justru menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemilihan lokasi kabupaten dan desa yang dijadikan sampel dalam perhitungan NTN juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut. Dengan demikian, meskipun produksi meningkat, nilai tukar nelayan belum mencapai target karena faktor ekonomi makro dan variasi kondisi lokal di wilayah sampel.

d) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya ditetapkan dengan target sebesar 30.614 ton, dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 39.897,94 ton, sehingga capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan produktivitas perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau yang signifikan dan konsisten. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh berbagai upaya strategis. Salah satunya adalah maksimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya pada ruang laut sesuai dengan konsep klaster budidaya, sehingga kegiatan budidaya dapat dilaksanakan secara terencana dan efisien. Selain itu, penerapan budidaya rumput laut dengan konsep industrialisasi dari hulu hingga hilir turut mendorong peningkatan produksi, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Upaya lainnya meliputi penyaluran hibah secara tepat sasaran, penambahan sarana dan prasarana budidaya berupa keramba jaring apung, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta pendampingan intensif terhadap kelompok pembudidaya oleh penyuluh perikanan dan personel Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Penerapan teknik budidaya yang tepat untuk meminimalisir dampak pergantian musim (pancaroba), serta pengendalian hama dan penyakit ikan, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi.

Dengan kombinasi strategi ini, jumlah produksi perikanan budidaya tidak hanya melampaui target kuantitatif, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pembudidaya, serta penguatan ekonomi berbasis kelautan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Indikator kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) ditetapkan dengan target sebesar 111,2, namun pada tahun 2024 terealisasi sebesar 96,69, sehingga target belum tercapai. Belum tercapainya indikator ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komponen biaya produksi dan konsumsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan biaya tersebut menyebabkan meningkatnya pengeluaran pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga berdampak pada nilai tukar yang diperoleh. Meskipun demikian, pencapaian NTPi tetap menjadi perhatian strategis, karena mencerminkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Upaya untuk memperbaiki nilai tukar ini mencakup pemberian pendampingan teknis dan bimbingan budidaya, peningkatan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya, serta penyaluran bantuan dan fasilitasi akses terhadap benih, pakan, dan alat produksi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan NTPi dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendorong keberlanjutan usaha budidaya ikan dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya di Provinsi Kepulauan Riau.

e) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase kasus IUU Fishing dan konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase kasus IUU Fishing dan konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan ditetapkan dengan target sebesar 90%, dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100%, karena seluruh laporan pelanggaran yang diterima berhasil ditangani secara tuntas. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan serta kemampuan perangkat daerah dalam menindak pelanggaran perikanan secara cepat dan tepat. Pencapaian indikator tersebut didukung oleh sejumlah upaya strategis.

Salah satunya adalah peningkatan kerja sama antara pengawas perikanan dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), yang berperan aktif dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan. Selain itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum, turut memperkuat koordinasi dan penanganan pelanggaran maupun tindak pidana di bidang perikanan. Upaya terpadu tersebut tidak hanya memastikan seluruh kasus IUU Fishing dan konflik pemanfaatan sumber daya kelautan terselesaikan, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi perikanan, meningkatkan keamanan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, serta membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di Provinsi Kepulauan Riau.

f) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

Indikator kinerja jumlah produk olahan hasil perikanan ditetapkan dengan target sebesar 13.200 ton, dan pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 19.692,58 ton, sehingga capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas pengolahan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, baik melalui penguatan unit pengolahan ikan skala rumah tangga maupun industri kecil dan menengah. Selain itu, pengembangan diversifikasi produk olahan perikanan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, serta pemanfaatan teknologi pengolahan yang lebih efisien turut berkontribusi terhadap peningkatan volume produksi. Keberhasilan ini juga didukung oleh berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, yang mengatur klasifikasi produk-produk hasil olahan perikanan sehingga mempermudah pengelolaan, standarisasi, dan pemasaran produk. Dengan kombinasi strategi tersebut, capaian produksi olahan perikanan tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga

mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Riau.

- Angka Konsumsi Ikan

Indikator kinerja Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan target sebesar 65,17 kg/kapita/tahun, dan terealisasi sebesar 68,17 kg/kapita/tahun, sehingga capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang bernilai gizi tinggi. Peningkatan AKI ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, ketersediaan ikan segar dan olahan di pasar lokal meningkat, seiring dengan produktivitas perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang melampaui target. Kedua, upaya promosi dan edukasi gizi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui program sosialisasi, kampanye konsumsi ikan dan penyuluhan gizi (Gemar ikan) di tingkat masyarakat berkontribusi pada perubahan perilaku konsumsi. Selain itu, aksesibilitas harga ikan yang relatif stabil dan program pemberdayaan usaha pengolahan ikan turut mempermudah masyarakat mendapatkan produk ikan berkualitas. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat pesisir yang terbiasa mengonsumsi ikan juga memperkuat pencapaian AKI.

Capaian AKI yang melampaui target ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan Masyarakat serta penyerapan produk perikanan lokal, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan industri perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

- Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan

Indikator kinerja nilai ekspor olahan hasil perikanan pada tahun 2024 ditetapkan dengan target sebesar 31.817.850 USD, dan terealisasi sebesar 48.579.904,53 USD, sehingga capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan signifikan ini menunjukkan keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong ekspor produk perikanan olahan, baik dalam hal volume maupun nilai serta menegaskan posisi wilayah ini sebagai salah satu daerah penghasil produk perikanan olahan yang kompetitif di pasar internasional. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor strategis. Beberapa diantaranya : peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk olahan perikanan, termasuk penguatan industri rumah tangga serta industri kecil dan menengah, memungkinkan produk memenuhi standar ekspor. Selanjutnya, pengembangan diversifikasi produk, penerapan teknologi pengolahan modern, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan turut meningkatkan daya saing produk di pasar global. Selain itu, strategi pemasaran ekspor yang efektif melalui kemitraan dengan pelaku usaha, promosi produk di pasar internasional, serta pemanfaatan jaringan distribusi dan pemasaran digital juga turut memperluas jangkauan pasar. Kebijakan pendukung dari pemerintah, termasuk implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, mempermudah klasifikasi, standarisasi, dan pengelolaan produk, sehingga mendukung kelancaran proses ekspor. Capaian nilai ekspor olahan perikanan yang melampaui target ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri perikanan berkelanjutan, memperkuat daya saing produk lokal di pasar global, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Tujuan /Sasaran/Program	Satuan	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026			Realisasi		Proyeksi	
		2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3313	3322	3330	5693,18	6052,98	5693,18	6052,98
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	Kawasan	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	308.305,60	308.921,60	309.538,60	320.391,79	339.331,02	308.921,60	309.538,60
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	116	116,1	116,3	104,14	105,28	116,1	116,3
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.614,37	32.955,78	35.288,63	31.250,00	39.898,00	32.955,78	35.288,63
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	111,2	111,76	112,32	96,08	96,69	111,76	112,32
Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	Persen	90	90	90	100	99	90	90
Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13.200,00	13.400,00	13.500,00	18.099,33	19.692,58	13.400,00	13.500,00
Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kap/tahun	65,17	65,36	65,62	67,8	68,17	65,36	65,62
Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	31.817.850,00	31.824.214,00	31.824.214,00	58.661.976,29	48.579.904,53	31.824.214,00	31.830.578,00

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu yang berkembang, antara lain :

1. **Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi daerah**

Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi daerah di Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan melalui penguatan tata kelola yang adaptif dan terintegrasi berbasis karakteristik wilayah kepulauan, dengan fokus pada perlindungan ekosistem laut dan pesisir, penguatan kelembagaan dan regulasi, peningkatan kapasitas pengelolaan, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat, guna menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan mendukung ekonomi biru daerah.

2. **Penyediaan sarana prasarana dan pelabuhan perikanan yang memadai dalam mendukung perikanan tangkap dan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)**

Penyediaan sarana prasarana dan pelabuhan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi kebutuhan mendesak mengingat belum tersedianya pelabuhan perikanan yang memadai dan terintegrasi, sehingga pendaratan, pencatatan hasil tangkap, serta pengawasan aktivitas perikanan belum optimal dalam mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Penguatan infrastruktur perikanan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha nelayan, ketertiban pengelolaan sumber daya ikan, dan keberlanjutan perikanan tangkap di wilayah Kepulauan Riau.

3. **Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya**

Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau perlu segera diimplementasikan mengingat besarnya potensi perairan yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, ketersediaan benih dan pakan, penerapan teknologi, serta kapasitas pelaku usaha. Tantangan lainnya meliputi kualitas lingkungan perairan dan konflik pemanfaatan ruang. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produksi, keberlanjutan, dan kontribusi perikanan budidaya terhadap perekonomian daerah.

4. Hilirisasi sektor perikanan

Hilirisasi sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi prioritas strategis karena sebagian besar hasil tangkapan dan budidaya masih dipasarkan dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah rendah dan kontribusi ekonomi daerah belum optimal. Keterbatasan fasilitas pengolahan, cold storage, transportasi, dan kapasitas SDM menjadi kendala utama. Upaya hilirisasi diarahkan pada pengembangan industri pengolahan, peningkatan mutu dan standar produk, serta penguatan rantai nilai untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

5. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan mengingat tingginya tekanan pemanfaatan laut, penyebaran pulau yang luas dan potensi penangkapan ikan berlebih. Keterbatasan kapasitas pengawas, sarana prasarana dan sistem informasi menjadi hambatan utama. Upaya ini diarahkan pada penguatan kelembagaan, modernisasi sarana pengawasan, integrasi sistem informasi, penegakan regulasi serta partisipasi masyarakat untuk menjamin pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan mendukung ekonomi perikanan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026. Penyusunan dokumen Rencana Kerja wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari tahapan pembangunan lima tahun yang pertama dari RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.

Dengan memperhatikan dokumen RKPD serta sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	39,12	55.023.148.423,00		39,12	64.940.964.439,69		
		Jumlah Total Produksi Perikanan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	0,00			358.738,82			
		Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.330,00			6.201,98			
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105,30			105,30			
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	100,50			100,50			
		Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	31.830.578,00			31.830.578,00			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	38.026.414.730,54		BB	41.848.240.259,69		
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	75			80,53			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0			85,83			
3.25.01,1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00			300.000.000,00		
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000,00	Tanjungpinang	2	200.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	50.000.000,00	Tanjungpinang	2	50.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	50.000.000,00	Tanjungpinang	4	50.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.631.725.384,54			37.866.498.502,36		
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	111	26.213.531.184,54	Tanjungpinang	294	36.448.304.302,36	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	1.418.194.200,00	Tanjungpinang	12	1.418.194.200,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01,1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00			15.000.000,00		
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	25.000.000,00	Tanjungpinang	1	15.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100.000.000,00			80.000.000,00		
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	100.000.000,00	Tanjungpinang	134	80.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1.577.344.640,00			1.168.435.000,00		
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	7	30.000.000,00	Tanjungpinang	7	20.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	8	65.000.000,00	Tanjungpinang	8	72.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12.000.000,00	Anambas	5	6.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5.000.000,00	Natuna	5	5.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5.000.000,00	Lingga	5	55.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12.000.000,00	Karimun	5	7.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12.000.000,00	Batam	5	17.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12.000.000,00	Bintan	5	4.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12.000.000,00	Tanjungpinang	5	20.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	12.000.000,00	Anambas	5	4.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5.000.000,00	Bintan	5	5.300.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.000.000,00	Tanjungpinang	12	30.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	900.000.000,00	Tanjungpinang	12	600.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	28.925.000,00	Anambas	12	60.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.917.900,00	Natuna	12	40.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000,00	Lingga	12	60.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000,00	Karimun	12	40.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	138.140.490,00	Batam	12	33.135.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	67.361.250,00	Bintan	12	20.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000,00	Tanjungpinang	12	10.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	45.000.000,00	Anambas	12	30.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	15.000.000,00	Bintan	12	30.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				542.000.000,00			491.000.000,00		
3.25.01.1.07..01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	250.000.000,00	Tanjungpinang	0	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.07..02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	150.000.000,00	Tanjungpinang	1	250.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	50.000.000,00	Tanjungpinang	3	150.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Anambas	1	11.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Natuna	1	11.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000,00	Lingga	1	5.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Karimun	1	11.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Batam	2	11.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Bintan	3	11.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Tanjungpinang	0	-	-	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Anambas	1	11.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01,1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000,00	Bintan	3	20.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01,1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.218.491.706,00			1.173.949.821,33		
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	138.239.800,00	Tanjungpinang	12	80.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12.480.000,00	Anambas	12	17.480.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	25.969.160,00	Natuna	12	25.969.160,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	32.178.000,00	Lingga	12	32.178.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	54.063.936,00	Karimun	12	58.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	65.135.000,00	Batam	12	72.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	176.320.000,00	Bintan	12	189.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	83.300.000,00	Tanjungpinang	12	85.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	348.000.000,00	Anambas	12	348.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	15.000.000,00	Bintan	12	25.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1.692.127.942,00	Tanjungpinang	12	241.322.661,33	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	217.548.456,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	564.206.359,00	Natuna	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	463.097.636,00	Lingga	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	882.925.440,00	Karimun	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	415.479.561,00	Batam	0	-	-	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1.016.134.282,00	Bintan	0	-	-	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	519.733.841,00	Tanjungpinang	0	-	-	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	466.552.293,00	Anambas	0	-	-	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01,1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	30.000.000,00	Bintan	0	-	-	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01,1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang				581.853.000,00			753.356.936,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Daerah									
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	100.000.000,00	Tanjungpinang	2	120.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	5.000.000,00	Natuna	2	5.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	5.000.000,00	Lingga	2	5.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Karimun	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Batam	2	10.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Bintan	0	-	-	UPTD Balai Benih Ikan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Tanjungpinang	0	-	-	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Anambas	2	10.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	-	0	-	-	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	60.000.000,00	Tanjungpinang	25	150.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	10.000.000,00	Anambas	2	30.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5.000.000,00	Natuna	2	5.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5.000.000,00	Lingga	2	5.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	2	15.000.000,00	Karimun	1	16.063.936,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000,00	Batam	2	25.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000,00	Bintan	1	5.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000,00	Tanjungpinang	1	5.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000,00	Anambas	2	5.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5.000.000,00	Bintan	1	1.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	17.293.000,00	Tanjungpinang	20	17.293.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	10.000.000,00	Anambas	5	3.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	5.000.000,00	Natuna	5	3.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	4.560.000,00	Lingga	5	3.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	15.000.000,00	Karimun	13	8.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	15.000.000,00	Batam	5	3.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	15.000.000,00	Bintan	5	5.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	15.000.000,00	Tanjungpinang	10	35.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	15.000.000,00	Anambas	5	8.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	-	3	2.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	20.000.000,00	Tanjungpinang	2	85.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	-	1	5.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5.000.000,00	Natuna	1	5.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5.000.000,00	Lingga	1	5.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	10.000.000,00	Karimun	1	5.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	10.000.000,00	Batam	1	5.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	10.000.000,00	Bintan	1	150.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	10.000.000,00	Tanjungpinang	0	-	-	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	10.000.000,00	Anambas	1	5.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	-	1	4.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	%	87,81	309.618.414,00		92	250.000.000,00		
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				159.618.414,00			150.000.000,00		
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	2684525,69	59.618.414,00	Tanjungpinang	2.684.526	50.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	2684525,69	30.000.000,00	Bintan	2.684.525,69	50.000.000,00	Bintan	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02.1.01.05	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil /Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	dokumen	1	70.000.000,00	Tanjungpinang	1	50.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				25.000.000,00			50.000.000,00		
3.25.02.1.02.07	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	48	25.000.000,00	Tanjungpinang	48	50.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil				125.000.000,00			50.000.000,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	40.000.000,00	Tanjungpinang	30	30.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	10.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	5.000.000,00	Natuna	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	5.000.000,00	Lingga	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	15.000.000,00	Karimun	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	30.000.000,00	Batam	0	-	-	Cabang Dinas KP Batam
3.25.02.1.03.06	Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Unit Usaha	1	20.000.000,00	Tanjungpinang	1	20.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	315281,973	12.766.646.751,80		316230,665	13.901.168.276,00		Perhitungan ada di excel
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				12.082.029.256,00			13.206.168.276,00		
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dokumen	1	20.000.000,00	Tanjungpinang	1	10.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	1	6.768.192.500,00	Prov. Kepri	1	6.768.192.500,00	Prov. Kepri	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.01.010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	5310	5.293.836.756,00	Prov. Kepri	4000	6.427.975.776,00	Prov. Kepri	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan				33.350.800,00			100.000.000,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									
3.25.03.1.03.04	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase	90	33.350.800,00	Prov. Kepri	90	100.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				591.266.695,80			550.000.000,00		
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1	500.000.000,00	Bintan	1	250.000.000,00	Natuna	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	2	26.524.595,80	Bintan	2	250.000.000,00	Bintan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	3	64.742.100,00	Anambas	3	50.000.000,00	Anambas	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.03.1.010	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				60.000.000,00			45.000.000,00		
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	10.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	5.000.000,00	Natuna	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	5.000.000,00	Lingga	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	20.000.000,00	Karimun	100	25.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	20.000.000,00	Batam	100	20.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	39899,26	2.403.152.615,00		42508,15536	7.631.555.904,00		
3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-			10.000.000,00		
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-		30	10.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Batam
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				2.403.152.615,00			7.621.555.904,00		
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	17.724.500,00	Tanjungpinang	1	20.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	15	750.007.112,00	Prov. Kepri	1000	4.319.852.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	-	-	4	150.000.000,00	Bintan	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	15	1.074.095.614,00	Prov. Kepri	15	1.500.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	-	-	0	-	-	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.04.1.05.012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2	450.000.000,00	Prov. Kepri	1	1.531.703.904,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	111.325.389,00	Prov. Kepri	1	100.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	90	1.197.921.988,00		90	910.000.000,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				1.117.921.988,00			890.000.000,00		
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	30	250.000.000,00	Prov. Kepri	20	210.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	15	40.000.000,00	Anambas	6	80.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	15	15.000.000,00	Natuna	3	40.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	15	15.000.000,00	Lingga	0		-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	15	78.539.940,00	Karimun	0		-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	15	80.000.000,00	Batam	4	20.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	100.000.000,00	Prov. Kepri	10	30.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	5.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	5.000.000,00	Natuna	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut	Pelaku Usaha	5	10.000.000,00	Karimun	0		-	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi								
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	10.000.000,00	Batam	0	-	-	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	32	100.000.000,00	Prov. Kepri	20	30.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	5.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	5.000.000,00	Natuna	12	5.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	-	25	50.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	20.000.000,00	Karimun	15	115.000.000,00	Karimun	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau	Pelaku Usaha	15	50.000.000,00	Batam	30	40.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi								
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	80.000.000,00	Prov. Kepri	10	30.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	10.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	5.000.000,00	Natuna	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	10.000.000,00	Karimun	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	30.000.000,00	Batam	0	-	-	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	40	119.382.048,00	Prov. Kepri	54	30.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	15	10.000.000,00	Anambas	4	35.000.000,00	Anambas	Cabang Dinas KP Anambas

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	15	5.000.000,00	Natuna	11	105.000.000,00	Natuna	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	0	-	-	6	30.000.000,00	Lingga	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	15	10.000.000,00	Karimun	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	15	50.000.000,00	Batam	11	40.000.000,00	Batam	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				80.000.000,00			20.000.000,00		
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	50.000.000,00	Prov. Kepri	10	20.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	5.000.000,00	Anambas	0	-	-	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	5.000.000,00	Natuna	0	-	-	Cabang Dinas KP Natuna

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	-	0	-	-	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	10.000.000,00	Karimun	0	-	-	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	5	10.000.000,00	Batam	0	-	-	Cabang Dinas KP Batam
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kap/tahun	40.61	319.393.923,66		41.37	400.000.000,00		
		Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13400			13500			
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15.000.000,00			115.000.000,00		
3.25.06.1.01.04	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	15.000.000,00	Tanjungpinang	2	65.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.01.07	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rekomendasi	0	-	-	25	50.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil				150.000.000,00			150.000.000,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
3.25.06.1.02.03	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	2	100.000.000,00	Prov. Kepri	2	100.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.02.03	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	1	50.000.000,00	Tanjungpinang	2	25.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.06.1.02.04	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	0	-	-	1	25.000.000,00	Tanjungpinang	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan				154.393.923,66			135.000.000,00		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			UNIT KERJA
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi									
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Unit Usaha	5	154.393.923,66	Tanjungpinang	2	135.000.000,00	Tanjungpinang	Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi perikanan;
2. Pembangunan awal pelabuhan perikanan;
3. Penjaminan kepada nelayan kecil melalui bantuan premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
5. Pemberdayaan nelayan melalui sertifikasi nelayan;
6. Promosi Gerakan Makan Ikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui;
7. Pemenuhan kebutuhan benih pada UPTD BBI;
8. Pengawasan usaha kelautan dan perikanan;
9. Jaminan mutu produk kelautan dan perikanan;
10. Fasilitasi promosi, logistik dan akses pasar produk kelautan dan perikanan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pemangku kepentingan dapat mengusulkan program atau kegiatan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan bottom-up (bawah ke atas), yang berlandaskan asas demokratisasi dan desentralisasi. Usulan ini dapat berasal dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah kabupaten/kota. Selain itu, sumber usulan juga dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi oleh Perangkat Daerah provinsi, baik melalui penelitian lapangan maupun pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkat kabupaten/kota, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Setelah diterima, setiap usulan ditelaah untuk menilai kesesuaian dengan isu strategis serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan yang relevan kemudian diakomodasi dalam program atau kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan dan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, usulan yang masuk dapat diklasifikasikan dan diakomodasi sebagaimana berikut:

1. Pembangunan pelabuhan perikanan yang memadai, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti dermaga, gudang, fasilitas bongkar muat, dan sarana penunjang lainnya, untuk meningkatkan kapasitas operasional nelayan, mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta mendorong pertumbuhan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dibutuhkan bantuan alat penangkapan ikan bagi para nelayan utamanya alat tangkap ikan ramah lingkungan serta alat penunjang penangkapan ikan lain seperti perahu, mesin boat, GPS Fish Finder dan lain sebagainya;
3. Dibutuhkan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya, meliputi Keramba Jaring Apung (KJA) berbahan HDPE, bibit, pakan, obat-obatan, serta sarana pendukung untuk budidaya ikan, rumput laut, dan jenis komoditas budidaya lainnya;
4. Dibutuhkan jaminan sosial bagi nelayan kecil melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meminimalkan risiko usaha perikanan;
5. Dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan bagi Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), seperti perahu, GPS, kamera, dan peralatan pendukung lainnya, guna memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Pengembangan kawasan untuk budidaya air tawar, termasuk penyediaan sarana, prasarana, dan pendampingan teknis, untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya perikanan air tawar.
7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dan usulan pemangku kepentingan dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan dan pokok-pokok pikiran diakomodir sebagaimana Tabel berikut:

2.4. Dukungan Perangkat Daerah dalam Pokok Pokok Pikiran Dewan Tahun 2026

NO	USULAN PERMASALAHAN (SESUAI KAMUS USULAN)	OUTPUT	SUB KEGIATAN	KETERANGAN		TOTAL
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES	
1	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Bubu Ketam dan Jaring	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
2	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kapal 15 Pk	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
3	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Boat dan Perlengkapan Nelayan	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
4	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	66	27	93
5	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Bantuan Peralatan Nelayan	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2		2
6	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Bantuan Radar Nelayan	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
7	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Perahu/Sampan/Boat	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	9		9
8	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Mesin Tempel 15 PK dan Boat	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5		5
9	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	boat pancung fiber mesin 15 PK	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2		2
10	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Accu Basah 12 A 50 Ah	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
11	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jaring Ikan Tamban	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
12	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jaring Udang	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2		2

NO	USULAN PERMASALAHAN (SESUAI KAMUS USULAN)	OUTPUT	SUB KEGIATAN	KETERANGAN		TOTAL
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES	
13	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kapal Fiber Mesin Tempel 40 PK	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
14	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kawat bubu	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
15	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Mesin Tianli 28	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
16	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Panel Surya Solar Cell 50 WP	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
17	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Viber 120 L	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
18	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kapal Motor 5GT	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2		2
19	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Pembangunan Tambatan Perahu	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1		1
20	Perlunya dukungan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kajian Akademis tentang karakteristik Nelayan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1		1
24	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Keramba jaring tancap dan apung	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2	4	6
25	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Prasarana Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	4	3	7
26	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Bibit ikan kerapu cantang	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1		1
27	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Bibit ikan kerapu cantang dan pakan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	17	6	23
28	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Bibit Gamat/Teripang	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2	2	4

NO	USULAN PERMASALAHAN (SESUAI KAMUS USULAN)	OUTPUT	SUB KEGIATAN	KETERANGAN		TOTAL
				DIPROSES LEBIH LANJUT	TIDAK DAPAT DIPROSES	
29	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Pembuatan Kolam dan Bibit Ikan dan Pakan untuk air tawar	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6	2	8
30	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Pengembangan budidaya tambak udang vaname	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	2	3
31	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Bibit Ketam Bakau	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1		1
32	Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Mesin Pelet Pakan Ikan	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1		1
33	Infrastruktur Bidang Kelautan dan Perikanan masih perlu pembenahan	Oven Pengereng Bilis	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1		1
34	Masih terdapat Illegal fishing, Unregulated fishing dan Unreported (IUU) Fishing.	Pengadaan Speed Boat 15 PK	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		1	1
TOTAL				136	48	184

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tahap pertama periode tahun 2025-2029 difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perluasan Kawasan Konservasi Perairan;
2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan;
3. Pengembangan Perikanan Budidaya Laut, Pesisir dan Tawar (darat) yang ramah lingkungan;
4. Pengendalian dan Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan;
5. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Guna mendukung arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 maka telah ditentukan beberapa indikator dan target tahun 2026 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
1	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	1.353.255,74	2.684.525,69	Target Rakortek merupakan angka kumulatif
2	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	1	1	
3	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	0	0	Tidak ada aktivitas produksi garam di Provinsi Kepulauan Riau
4	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	34	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
5	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	92	102	
6	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	30	10	
7	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	40	10	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEKRENBANG 2025	TARGET RKPD 2026	KET.
8	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	0	Belum ada catatan di PUD Provinsi Kepulauan Riau
9	3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	0	Belum ada catatan di PUD Provinsi Kepulauan Riau

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada RKPD maupun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan secara rasional, terukur dan mudah dicapai sehingga dapat dilaksanakan dalam tempo waktu 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu juga, indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu diperhatikan karena merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja suatu OPD.

Menjabarkan misi ke-1 Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan” maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan” diukur melalui indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebagai indikator kinerja. Dengan target pada tahun 2026 sebesar 39,13. Tujuan tersebut dapat diterjemahkan secara spesifik menjadi Sasaran beserta indikator sebagai berikut.

Sasaran :

Meningkatkan produktivitas kelautan dan Perikanan serta Kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan tata kelola yang berkelanjutan, dengan indikator :

1. Jumlah Total Produksi Perikanan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan target 358.738,82 ton;
2. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku dengan target 6.201,98 miliar rupiah;
3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan target 105,30;
4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dengan target 100,50; dan
5. Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan dengan target USD 31.830.578,00 .

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah selaras dalam mendukung kinerja pembangunan daerah yang diukur pada Aspek Pelayanan Umum kedalam Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan melalui Indikator Kinerja Pembangunan Daerah.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	39,12
	Meningkatkan produktivitas kelautan dan Perikanan serta Kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan tata kelola yang berkelanjutan	Jumlah Total Produksi Perikanan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	358.738,82
		Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	6.201,98
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105,30
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	100,50
		Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	31.830.578,00

3.3. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan disusun sebagai upaya strategis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Rencana tersebut terdiri atas 6 (enam) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) subkegiatan. Seluruh rencana ini mencerminkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan daerah, dan disajikan sebagaimana berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan:

a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- 2) Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil /Dokumen Final RZWP-3-K

b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

Sub Kegiatan:

- 1) Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2) Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan:

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 3) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Sub Kegiatan:

- 1) Rekomendasi Perizinan Berusaha Sub sektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran di atas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil

c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 2) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

d. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan:

a. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- 3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

- 4) Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 5) Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan:

a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan:

- 1) Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan
- 2) Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- 3) Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
- 4) Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
- 5) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 2) Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar

b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sub Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
- 2) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- 1) Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PERNDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 antara lain:

1. Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan;
2. Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana
3. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.

4.1. RENCANA KERJA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyelesaian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Program Kerja Tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan diselaraskan dengan RKPD Tahun 2026. Pendanaan bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kebutuhan pendanaannya tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program / Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5 a	6 b	6 c	6 d	6 e	6 f	7 a	7 b	8
	Urusan Kelautan dan Perikanan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	39,12	64.940.964.439,69					39,70	68.634.691.002,36	
		Jumlah Total Produksi Perikanan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	358.738,82						362.468,42		
		Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	6.201,98						6.276,48		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105,30						105,31		
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai	100,50						101,00		
		Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	31.830.578,00						31.836.942,00		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	41.848.240.259,69					BB	41.848.830.987,36	
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	80,53						80,84		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,83						85,85		
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000,00					300.000.000,00		
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	200.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			3	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	50.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			2	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	50.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			4	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.866.498.502,36						37.866.498.502,36	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	294	36.448.304.302,36	Tanjungpinang	PAD			294	36.448.304.302,36	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	1.418.194.200,00	Tanjungpinang	PAD			12	1.418.194.200,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000,00						15.000.000,00	
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000,00						80.000.000,00	
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		134	80.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			20	80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.168.435.000,00						1.169.025.727,67	
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	7	20.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			10	70.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	8	72.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			8	82.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	6.000.000,00	Anambas	PAD			5	7.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5.000.000,00	Natuna	PAD			5	7.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	55.000.000,00	Lingga	PAD			5	7.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	7.000.000,00	Karimun	PAD			5	7.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	17.000.000,00	Batam	PAD			5	7.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	4.000.000,00	Bintan	PAD			5	7.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	20.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			5	7.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	4.000.000,00	Anambas	PAD			5	7.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5.300.000,00	Bintan	PAD			5	7.300.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			12	30.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	600.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			12	600.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	60.000.000,00	Anambas	PAD			12	60.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000,00	Natuna	PAD			12	40.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	60.000.000,00	Lingga	PAD			12	60.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	40.000.000,00	Karimun	PAD			12	40.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	33.135.000,00	Batam	PAD			12	33.725.727,67	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000,00	Bintan	PAD			12	20.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			12	10.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	30.000.000,00	Anambas	PAD			12	30.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	30.000.000,00	Bintan	PAD			12	30.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				491.000.000,00						491.000.000,00	
3.25.01.1.07..02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	250.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	150.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			3	155.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Anambas	PAD			2	8.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Natuna	PAD			2	8.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	5.000.000,00	Lingga	PAD			2	8.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Karimun	PAD			2	8.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	11.000.000,00	Batam	PAD			2	8.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	11.000.000,00	Bintan	PAD			2	8.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	-					2	8.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	1	11.000.000,00	Anambas	PAD			2	10.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.07..06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	20.000.000,00	Bintan	PAD			2	20.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.173.949.821,33						1.173.949.821,33	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	12	80.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			12	80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
		Air dan Listrik yang disediakan										
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	17.480.000,00	Anambas	PAD			12	17.480.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	25.969.160,00	Natuna	PAD			12	25.969.160,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	32.178.000,00	Lingga	PAD			12	32.178.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	58.000.000,00	Karimun	PAD			12	58.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	72.000.000,00	Batam	PAD			12	72.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	189.000.000,00	Bintan	PAD			12	189.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	85.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			12	85.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	348.000.000,00	Anambas	PAD			12	348.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	25.000.000,00	Bintan	PAD			12	25.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	241.322.661,33	Tanjungpinang	PAD			12	241.322.661,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				753.356.936,00						753.356.936,00	
3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	120.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			2	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	5.000.000,00	Natuna	PAD			0	-	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	5.000.000,00	Lingga	PAD			2	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Batam	PAD			2	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	10.000.000,00	Anambas	PAD			2	10.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	150.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			25	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	30.000.000,00	Anambas	PAD			2	30.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5.000.000,00	Natuna	PAD			2	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5.000.000,00	Lingga	PAD			2	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	16.063.936,00	Karimun	PAD			2	15.063.936,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25.000.000,00	Batam	PAD			2	25.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000,00	Bintan	PAD			1	5.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			2	5.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01,1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	5.000.000,00	Anambas	PAD			2	5.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1.000.000,00	Bintan	PAD			1	2.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	17.293.000,00	Tanjungpinang	PAD			20	17.293.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01,1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.000.000,00	Anambas	PAD			5	3.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.000.000,00	Natuna	PAD			5	3.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.000.000,00	Lingga	PAD			5	3.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	13	8.000.000,00	Karimun	PAD			5	8.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	3.000.000,00	Batam	PAD			5	3.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	5.000.000,00	Bintan	PAD			5	5.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	35.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			5	35.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	5	8.000.000,00	Anambas	PAD			5	8.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	3	2.000.000,00	Bintan	PAD			2	2.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	85.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			2	85.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000,00	Anambas	PAD			1	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000,00	Natuna	PAD			1	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000,00	Lingga	PAD			1	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Unit	1	5.000.000,00	Karimun	PAD			1	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi										
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000,00	Batam	PAD			1	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000,00	Bintan	PAD			1	150.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000,00	Anambas	PAD			1	5.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000,00	Bintan	PAD			1	4.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum	%	92	250.000.000,00					94	1.000.000.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				150.000.000,00						570.000.000,00	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Peisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	2.684.526	50.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			2.738.198	259.618.414,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Peisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang terkelola	Ha	2.684.525,69	50.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			2.738.198,44	200.000.000,00	UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
3.25.02.1.01.05	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil /Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	dokumen	1	50.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	110.381.586,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut				50.000.000,00						100.000.000,00	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
	di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											
3.25.02.1.02.07	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	48	50.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			48	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil				50.000.000,00						330.000.000,00	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	30.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			50	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-					30	30.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-					30	30.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-					30	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-					30	30.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-					30	30.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.02.1.03.06	Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Unit Usaha	1	20.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	316.230,67	13.901.168.276,00					317.179,36	14.831.904.651,00	Perhitungan ada di excel
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				13.206.168.276,00						13.582.029.256,00	
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang Tersedia di	Dokumen	1	10.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
		Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil										
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	1	6.768.192.500,00	Prov. Kepri	PAD			1	6.768.192.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.01.010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4000	6.427.975.776,00	Prov. Kepri	PAD			5.800	6.793.836.756,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				100.000.000,00						33.350.800,00	
3.25.03.1.03.04	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase	90	100.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			90	33.350.800,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				550.000.000,00						1.136.524.595,00	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1	250.000.000,00	Natuna	PAD			1	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	2	250.000.000,00	Natuna	PAD			2	26.524.595,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	3	50.000.000,00	Anambas	PAD			3	110.000.000,00	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
3.25.03.1.010	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				45.000.000,00						80.000.000,00	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-					50	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-					100	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	-					100	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	25.000.000,00	Karimun	PAD			100	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.03.1.010.03	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	100	20.000.000,00	Batam	PAD			100	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42.508,16	7.631.555.904,00					45.289,06	8.243.395.364,00	
3.25.04.1.04	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				10.000.000,00						70.000.000,00	
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	30	10.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			50	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	Anambas				50	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	Natuna				50	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	Lingga				50	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0		Karimun				50	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.04.1.04.02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0	-	Batam				50	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				7.621.555.904,00						8.173.395.364,00	
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	20.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	17.724.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1000	4.319.852.000,00	Prov. Kepri	PAD			800	3.656.214.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	4	150.000.000,00	Bintan	PAD			3	275.361.250,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	15	1.500.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			20	2.074.095.614,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	-					4	1.800.000.000,00	UPTD Balai Benih Ikan
3.25.04.1.05.012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	1.531.703.904,00	Prov. Kepri	PAD			2	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.1.05.013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			1	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	90	910.000.000,00					90	1.569.560.000,00	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				890.000.000,00						1.470.000.000,00	
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	20	210.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			30	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	6	80.000.000,00	Anambas	PAD			10	100.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	3	40.000.000,00	Natuna	PAD			3	100.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	0		Lingga				10	110.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	0		Karimun				10	110.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	hari	4	20.000.000,00	Batam	PAD			10	95.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	30.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			15	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Anambas				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Natuna				5	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Lingga				5	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0		Karimun				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
	Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										
3.25.05.1.01.013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Batam				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	20	30.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			35	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Anambas				15	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	12	5.000.000,00	Natuna	PAD			15	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	25	50.000.000,00	Lingga	PAD			15	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	15	115.000.000,00	Karimun	PAD			15	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
		kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										
3.25.05.1.01.014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	30	40.000.000,00	Batam	PAD			15	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	30.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			15	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Anambas				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Natuna				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Lingga				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Karimun				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Batam				5	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	54	30.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			54	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	4	35.000.000,00	Anambas	PAD			3	5.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	11	105.000.000,00	Natuna	PAD			16	20.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	6	30.000.000,00	Lingga	PAD			6	15.000.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	0	-	Karimun				19	50.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.01.017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Pelaku Usaha	11	40.000.000,00	Batam	PAD			11	50.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				20.000.000,00						99.560.000,00	
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	10	20.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			20	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Anambas				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Anambas
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil	Pelaku Usaha	0	-	Natuna				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Natuna

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
	dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi										
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Lingga				5	9.560.000,00	Cabang Dinas KP Lingga
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Karimun				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Karimun
3.25.05.1.02.004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	-	Batam				5	10.000.000,00	Cabang Dinas KP Batam
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kap/tahun	41.37	400.000.000,00					42.13	1.141.000.000,00	
		Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	13.500						13.600		
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				115.000.000,00						96.000.000,00	
3.25.06.1.01.04	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2	65.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			1	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
3.25.06.1.01.07	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rekomendasi	25	50.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			30	81.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				150.000.000,00						695.000.000,00	
3.25.06.1.02.03	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	2	100.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			2	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.02.03	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	2	25.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			2	220.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP
3.25.06.1.02.04	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha	Kegiatan	1	25.000.000,00	Tanjungpinang	PAD			2	75.000.000,00	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk KP

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Unit Kerja
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah			
		dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko										
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				135.000.000,00						350.000.000,00	
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	2	135.000.000,00	Prov. Kepri	PAD			4	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Program prioritas daerah yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau merupakan program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal di sektor kelautan dan perikanan. Rencana program dan kegiatan prioritas disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat pesisir dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Aspirasi dan kebutuhan tersebut dihimpun melalui mekanisme Musrenbang. Namun, seiring keterbatasan anggaran, tidak seluruh usulan dapat diakomodasi dalam RKPD, sehingga dilakukan penetapan skala prioritas program dan kegiatan yang paling strategis dan berdampak untuk dapat dianggarkan.

Adapun program dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026

Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Program	Indikator Program dan Satuan	Target Tahun 2026	Alokasi Anggaran
Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rupiah)	3.330,31	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	316.230,70	13.901.168.276,00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.508,16	7.631.555.904,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 mengakomodir aspirasi masyarakat, usulan DPRD serta prioritas pembangunan daerah dan nasional di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan prioritas meliputi peyediaan BPJS Keteagakerjaan bagi nelayan kecil, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budaidaya, pembangunan awal pelabuhan perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan memerlukan dukungan anggaran dan pendampingan teknis agar persyaratan terpenuhi dan integritas program terjaga.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 terdiri atas 6 program, 22 kegiatan, dan 49 sub kegiatan yang diarahkan untuk menjawab isu strategis, mengoptimalkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.

5.1. KAIDAH KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja berpedoman pada RPJMD, Renstra Dinas, dan RKPD Tahun 2026 serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sektor kelautan dan perikanan

2. Renja disusun melalui pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat, pelaku usaha dan usulan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Program dan kegiatan difokuskan pada isu strategis, prioritas pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
5. Penyusunan Renja menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 oleh seluruh unit kerja di lingkup Dinas dalam mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, Renja Tahun 2026 juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Tanjungpinang, 15 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. SAID SUDRAJAD, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690504 200003 1 008



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



@humasdkpprovkepri



dislautkan.kepriprov.go.id